

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Wawasan

Wilayah: BPK Jateng

Perkuat Sinergitas, Polri Kejaksaan dan BPK Teken Nota Kesepahaman

<https://wawasan.co/news/detail/13944/perkuat-sinergitas-polri-kejaksaan-dan-bpk-teken-nota-kesepahaman>

SEMARANG, WAWASANCO - Dalam kurun waktu Januari-Juni 2020, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara atau aset sekitar Rp 45 miliar. Penyelamatan keuangan negara tersebut, diperoleh tak hanya dari pengembalian kerugian atas sebuah perkara, tetapi juga dari berbagai hal. Termasuk dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

"Jadi dalam kurun Januari-Juni 2020, kita sudah melakukan penyelamatan sampai Rp 45 miliar. Penyelamatan keuangan negara tak hanya dari perkara saja, PNPB juga," papar Kajati Jateng Priyanto, usai menyaksikan secara virtual penandatanganan nota kesepahaman antara BPK, Kejaksaan dan Polri, di Kantor BPK Jateng, Semarang, Selasa (11/8/2020).

Kini, seiring dengan adanya nota kesepahaman tersebut, pihaknya ingin agar sinergitas yang dibangun tak hanya sebatas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK. Namun, lebih ke penyelamatan aset. "Makanya, dengan adanya MoU ini, semakin kita tingkatkan," katanya.

Sementara, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ayub Amali menuturkan, sebelum penandatanganan MoU tersebut, pihaknya sudah rutin berkoordinasi dengan Kejati dan Polda Jateng.

Koordinasi yang dilakukan terkait adanya temuan kerugian keuangan dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK di berbagai daerah di Jateng. "Sudah banyak permasalahan yang kami koordinasikan sampai penyidikan. Apalagi terkait hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK. Bahkan Polda dan Kejati juga aktif berkomunikasi," katanya.

Dengan sinergitas yang baik tersebut, Ayub mengklaim banyak permasalahan terkait keuangan daerah yang telah terselesaikan. Sehingga pada 2020 ini, laporan keuangan seluruh daerah di Jawa Tengah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Laporan keuangan WTP itu tentunya sudah sesuai standar peraturan perundang-undangan, sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengelolaan keuangannya sudah sangat baik," jelasnya.

Sedangkan terkait kegiatan MoU, BPK menyepakati sinergitas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan yang berindikasi kerugian negara/daerah atau unsur pidana dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Penandatanganan yang disaksikan secara virtual oleh Kapolda, Kajati, Kapolres dan Kajari seluruh Indonesia itu juga diikuti salam sinergitas antara Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah yang diwakili Wakapolda, dan Kajati Jawa Tengah.

Nota kesepahaman antara BPK dengan Polri dan Kejaksaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. Adanya nota kesepahaman itu, diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antar instansi.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH